

KELEMBAGAAN HUTAN DESA DI DESA LONCA KECAMATAN KULAWI KABUPATEN SIGI

Andro Jamal Mondo¹⁾, Akhbar²⁾, Golar³⁾

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako
Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Korespondensi : Andromondo@gmail.com

²⁾ Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Abstract

Village Forest as The state forest area which is in village administration area that managed by economic organization in the village, it gives public service that relates to the arrangement and management of the forest. To prepare and to watch the implementation of the village forest management, the society and the official government of Lonca village by the meeting that held on 6-7 November 2011, had established the Organization of Lonca Village Forest Management. The establishment of the organization is to support the success of Village Forest in the Loca village Kulawi subdistrict Sigi district. The problem of the research was what the roles of village Forest Organization in supporting the development of the Village Forest. The research was conducted on May up to the month of July 2015, that located in Lonca village Kulawi subdistrict Sigi district. The data gathering was done by observing and interviewing by using questionnaire. The research method applied descriptive analysis, that including role analysis (4R) and analysis method of frequency distribution (modus), it was the rate/number that frequently revealed in the series of numbers/numbers list. The result of the research found that the all organizations that related to the planning of village Forest Management worked together and did the jobs especially the Organization of Village Forest Management. Otherwise, the Planning program of Village Forest Management in Loncavillage had not worked optimally, it caused of no program of work that owned, so what would be done by the organization of village Forest Management was not clear yet.

Keywords: Organization, Village Forest, Lonca village

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah memberikan konsep dasar pengelolaan hutan di Indonesia. Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi warga negara Indonesia secara umum dan masyarakat sekitar hutan secara khusus. Keuntungan yang dimaksud dapat diwujudkan melalui pengelolaan hutan secara optimal sesuai dengan fungsi masing masing (Emban dkk, 2011).

Hutan desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa (Lembaga Desa) dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pembentukan Hutan Desa atas dasar pertimbangan pemberdayaan masyarakat di

dalam dan sekitar kawasan hutan, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi (Asep dan Tarigan, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu, (Golar, 2007, Siddiq 2014) menyimpulkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya sangat didukung oleh kelembagaan yang ada, terutama aturan yang dimiliki. Melalui kelembagaan tersebut maka pola pemanfaatan dapat berlangsung dengan baik.

Suatu lembaga harus memiliki suatu kemampuan untuk dapat melihat kapasitas dan kinerja dari anggota dan lembaga secara keseluruhan. Lembaga adalah wadah dimana

sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama (Awang dkk, 2008).

Untuk mempersiapkan dan mengawal penyelenggaraan pengelolaan hutan desa, masyarakat dan pemerintah Desa Lonca melalui pertemuan desa pada tanggal 6-7 November 2011, telah membentuk Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Lonca (LPHD). Pembentukan kelembagaan ini untuk mendukung keberhasilan Hutan Desa di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran lembaga dalam membangun Hutan Desa Lonca.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang program Hutan Desa di Desa.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2015 di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian: Kuisioner, yang digunakan sebagai instrumen dalam pengumpulan data langsung dari lapangan.

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: alat tulis menulis, kamera, kalkulator dan komputer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*In depth interview*), dengan instrumen pedoman pertanyaan penelitian terkait dengan kelembagaan HD di Desa Lonca.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara terhadap masyarakat (responden), berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah

disusun dalam bentuk (kuisioner). Data ini meliputi informasi tentang identitas responden dan jenis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah karakteristik individu meliputi pendapatan keluarga, umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, luas lahan yang dimiliki, serta tingkat partisipasi masyarakat (keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi). Wawancara dilakukan berdasarkan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan kajian-kajian penelitian terdahulu melalui penelusuran pustaka yang ada, dan dari berbagai instansi terkait (balai pengelolaan daerah aliran sungai, dinas lingkup kehutanan). Data sekunder meliputi keadaan geografis, demografis, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Sampel Lokasi

Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan lokasi penelitian adalah menggunakan metode observasi lapangan dengan cara sengaja (*purposive sampling*), dengan pertimbangan lembaga-lembaga yang ada di Desa Lonca.

Sampel Responden

Penentuan responden dilakukan secara sengaja, responden dalam kajian ini adalah: Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LPHD, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah.

Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan dinamika diantara berbagai pihak ditingkat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai ikatan kepentingan terhadap sumberdaya hutan. Pada kajian peranan para pihak ini digunakan pendekatan analisis 4R (*Rights, Responsibilities, Revenues, dan Relationship*) (Zubayr. M., dkk, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Hutan Desa

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan ada beberapa lembaga yang mendukung atau berpartisipasi dalam membangun HD Lonca antara lain: Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama, dan Toko Perempuan. Untuk mempersiapkan dan mengawal penyelenggaraan pengelolaan hutan desa, masyarakat dan pemerintah desa Lonca melalui pertemuan desa tanggal 6-7 November 2011, telah membentuk Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD).

Peran Dinas Kehutanan Dalam Pembangunan Hutan Desa

Hutan Desa adalah salah satu wujud kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kebijakan ini perlu disosialisasikan pada masyarakat dan institusi terkait agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Selain itu, Hutan Desa diharapkan memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Suwanti dkk, 2015).

Untuk melihat hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Para pihak	Hak	Skor	Tanggung jawab	Skor	manfaat	skor	Hak. Antar pihak	Skor
Dinas kehutanan provinsi	Memfasilitasi dalam pengurusan izin pembangunan hutan desa	5	Memberikan Pendampingan pada setiap tahap penyelenggaraan hutan desa	5	Agar Hutan yang ada di Desa Lonca tetap lestari	3	Tidak adanya konflik atau masalah	5

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah memfasilitasi program pembangunan Hutan Desa dengan mengeluarkan SK penetapan areal Hutan Desa

di Desa Lonca, serta SK Kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa.

Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Hutan Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Jusuf dan Rauf, 2011). Kepala Desa memiliki peranan yang besar dalam pengambilan dan penetapan keputusan yang ada di desa. Desa Lonca merupakan salah satu desa di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang mengusulkan dicanangkannya program HD., Tujuan pengusulan pembangunan HD di Desa Lonca adalah untuk menyalurkan keinginan masyarakat Desa Lonca dalam mendapatkan akses legal dalam mengelola lahannya di dalam kawasan hutan yang sebagian besar mata pencahariannya berada dalam kawasan hutan.

Untuk melihat hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak pemerintah Desa Lonca Kecamatan Kulawi dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak pemerintah Desa Lonca Kecamatan Kulawi

Para pihak	Hak	Skor	Tanggung jawab	Skor	manfaat	Skor	Hak. Antar pihak	Skor
Pemerintah Desa	Pengambilan dan menetapkan keputusan yang ada di desa serta merencanakan pengusulan pembangunan HD	5	Penanganan konflik, pengawasan dan sebagai motifator	3	Meningkatkan pembangunan sosial ekonomi di Desa Lonca	3	Tidak adanya konflik atau masalah	5

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa, bahwa telah mengusulkan permohonan izin pembangunan hutan desa dan telah menetapkan areal Hutan Desa bersama tokoh-tokoh masyarakat Desa Lonca.

Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Hutan Desa

Hukum adat merupakan bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Hukum adat memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah (Magdalena, 2013).

Alternatif yang dapat digunakan dalam menanggulangi masalah konflik atas hutan adat adalah dengan menggunakan aturan dan kebiasaan setempat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Dimana hukum adat merupakan cerminan pola hidup masyarakat adat, yang lahir secara langsung sebagai penjelmaan perasaan hukum dan keadilan didalam masyarakat adat tersebut (Aris dkk, 2014).

Untuk melihat hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak Lembaga Adat Desa Lonca Kecamatan Kulawi dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak Lembaga Adat Desa Lonca Kecamatan Kulawi

Para pihak	Hak	Skor	Tanggung jawab	Skor	manfaat	Skor	Hak, Antar pihak	Skor
Lembaga Adat	Berwewenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum Adat yang berlaku	5	Mengatur kehidupan masyarakat maupun lingkungan Alam sekitarnya sesuai dengan aturan-aturan Adat	3	Mengangkat kembali eksistensi lembaga Adat dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam	3	Tidak adanya konflik atau masalah	5

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua lembaga adat bersama beberapa anggotanya, bahwa lembaga ini sangat mendukung pembangunan Hutan Desa, menurut keterangan ketua lembaga adat bahwa peran lembaga adat belum berjalan sesuai dengan fungsinya, namun dengan adanya pembangunan Hutan Desa dapat mengikat kembali eksistensi lembaga adat

dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Peran Lembaga Hutan Desa di Desa Lonca

Mengacu pada ketentuan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008, kewenangan pengelolaan hutan desa dilakukan oleh lembaga desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Untuk mempersiapkan dan mengawal penyelenggaraan pengelolaan HD, masyarakat dan pemerintah Desa Lonca melalui pertemuan desa tanggal 6–7 november 2011, telah membentuk Lembaga Pengelolaan Desa Lonca (LPHD). Pembentukan kelembagaan ini sekaligus, untuk memenuhi persyaratan pengusulan hutan desa, kepada menteri kehutanan.

Kelembagaan ini bersifat multi pihak dan keanggotaanya terdiri dari wakil semua unsur kelembagaan yang ada di Desa Lonca. Masa kepengurusan LPHD 5 (lima) tahun, dan pembentukan pengurusannya hanya dapat dilakukan melalui pertemuan desa, meskipun secara struktural posisinya adalah bagian fungsional dari pemerintah desa.

Untuk melihat hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak Lembaga Adat Desa Lonca Kecamatan Kulawi dapat dilihat pada Tabel 4:

Tabel 4. Hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pihak LPHD di Desa Lonca Kecamatan Kulawi.

Para pihak	Hak	Skor	Tanggung jawab	Skor	manfaat	skor	Hak, Antar pihak	Skor
Lembaga pengelolaan Hutan Desa	Rencana pengelolaan Hutan Desa	5	Menjalankan seluruh rencana pengelolaan Hutan Desa	3	Memberikan akses kepada desa dalam mengelola sumber daya Hutan secara lestari	3	Tidak adanya konflik atau masalah	5

Pada penyusunan rencana pengelolaan HD di Desa Lonca, RPHD merupakan acuan bagi pemegang hak dalam melaksanakan kegiatan

pengelolaan hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan serta sebagai alat pengendalian bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta KPH. Rencana pengelolaan hutan desa sebagai mana pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa bab V tentang rencana pengelolaan hutan desa pasal 17 ayat 2 bahwa rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Rencana Kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKHPHD)
- b. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)
- c. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) (Kementrian Kehutanan, 2014).

Program belum terlaksana dikarenakan masih dalam tahap penyusunan program kerja sehingga manfaat dan dampak pembangunan hutan desa belum dirasakan oleh masyarakat Desa Lonca. Kehidupan masyarakat pedesaan, terutama masyarakat yang berada di sekitar hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam. Pemanfaatan sumberdaya alam didukung oleh pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat (Asiah, 2009).

Perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan HD adalah suatu program yang ditujukan sebagai salah satu usaha yang diharapkan mampu untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan diharapkan dapat memberikan manfaat secara lestari, produktif, adil dan efisien bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Gunawan dkk, 2012).

Sistem kelembagaan pengelolaan hutan desa pada prinsipnya sama untuk tiga desa/kelurahan yaitu mencakup seperangkat aturan bersama, perilaku bersama, untuk mencapai tujuan bersama. Aturan-aturan bersama tersebut antara lain: setiap petani dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan desa, dilarang memindah tangankan hak penggarapan, menggadaikan, dan atau menjaminkan, dilarang menebang pohon, dilarang menggerek pohon yang dapat menyebabkan kematian pohon (Supratman dan Sahide, 2013).

Selanjutnya pengelolaan kawasan hutan yang lestari disertai dengan peningkatan fungsi-

fungsinya dapat terwujud, apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh adanya partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait lainnya (Mahbub, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan (LPHD) di Desa Lonca, Ketua LPHD merupakan *Stakeholder* utama yang mejadi objek penelitian, *stakeholder* ini bertanggung jawab melakukan penataan, perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan pada kawasan hutan desa, serta menyusun rencana kelola, pemanfaatan SDH, memberdayakan masyarakat setempat yang dilakukan di Hutan Desa.

Hasil wawancara di lapangan bahwa seluruh program perencanaan pengelolaan hutan desa masih dalam proses penyusunan program rencana kerja sehingga satupun program dilapangan belum ada yang terlaksana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa semua lembaga-lembaga yang terkait dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan Desa bekerjasama dan menjalankan tugasnya masing-masing khususnya Lembaga Pengelolaan Hutan Desa di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Namun Program Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) di Desa Lonca belum berjalan optimal, disebabkan program Rencana Pengelolaan Hutan Desa masih dalam proses penyusunan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Lumangkung. A., Nugroho. R.J, 2014. *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pada Hutan Adat di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau*. Universitas Tanjung Pura. Pontianak.
- Asiah. N. 2009. *Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan (Kasus di Desa Cijagang dan Desa Suka Mulya Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

- Asep A., Tarigan. 2010. *Hutan Desa Lubuk Beringn: Skenario Konservasi Kabupaten Bongo*. Jurnal Kiprah Agroforetry. 3(2):1-16.
- Awang SA, Wahyu TW, B.H, A.A, R.M.S, S,A.N, 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Pusat Kajian Hutan Rakyat Univesitas Gadju Mada.
- Emban. IM., Supratman., DM, Model *Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Mandiri Di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru*. Jurnal Hutan dan Masyarakat. 6(2): 93-99.
- Gunawan. KS. RA. Barkey. M. AIH. 2012, *Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan*. Jurnal Soial. 12(2): 1-14.
- Jusuf. Y., Rauf. F. 2011. *Studi Pengusulan Hutan Desa Di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Hutan Dan Masyarakat. 6(2):79-91.
- Magdalena, 2013. *Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Hutan di Desa Sesaot, Nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang, Kalimantan Timur*. Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 10(2):110-121.
- Mahbub. M. AS. 2007, *Penyuluhan Kehutanan Partisipatif*. Jurnal Hutan dan Masyarakat. 2(3): 313-318.
- Menhut, 20014. *Peraturan Mentri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 89/menhut-11/2014*. Tentang Hutan Desa
- Satriani, Golar, Ihsan., M, 2007. Strategi Adaptasi masyarakat Adat Toro: *Kajian Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah*. Warta Rimba Volume 1 No 1.
- Siddiq, NK. 2014. *Tinjauan Yuridis Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya)*. Mataram.
- Supratman dan Sahide, 2013. *Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng*. Direktur Bina Perhutanan Sosial
- Suwarti. M. Soeaidy. Suryadi, 2015. *Implementasi Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan Desa di Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal Reformasi. 5(1): 195-203.
- Zubayr. M., Darusman. D., Nugroho. B., Nurrohmat. R. D, 2014. *Peranan para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan*. Bogor. Jurnal Analisis Kebijakan Volume 11 No. 3, Desember 2014 : 239-259.